

III

Penguatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah melalui Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Samarinda

Anif Muchlashin¹

¹Universitas Mulawarman, Indonesia

* anifmuchlashin@fisip.unmul.ac.id

Article history

Submitted: 2025/09/29; Revised: 2025/10/17; Accepted: 2025/11/02

Abstract

The socialization of the Family Development Index (iBangga) in Samarinda City is part of a community service program with a descriptive-participatory approach, which aims to increase the understanding of local stakeholders regarding the importance of family development as the basis for human development. The activity was carried out by the Population Control and Family Planning Agency (DPPKB) of Samarinda City on September 25, 2025, at the DPPKB Office Hall in Samarinda City, involving 50 participants consisting of village heads, sub-district heads, Family Planning Assistant Cadres (PPKB), and Family Planning Field Officers (PLKB) from all sub-districts in Samarinda City. The activity was evaluated through pre-tests and post-tests to measure the increase in participants' knowledge of the concept and application of iBangga. The analysis results showed an increase in the average score from 61.28 on the pre-test to 64.47 on the post-test, with the median increasing from 60 to 65. The distribution of participants' scores also shifted towards higher scores, indicating that the socialization had a positive impact on participants' understanding. Enthusiasm was evident from the many questions asked, particularly regarding budgeting, technical measurement of iBangga indicators, concrete steps for implementation at the sub-district and village head levels, and strengthening the role of cadres in the field. The results of this activity have practical implications for regional policy, namely the importance of drafting a Mayor Regulation (Perwali) on the Implementation of iBangga in Samarinda City as a legal umbrella that strengthens governance and reporting on family development. In addition, sustainable budget support, capacity building for officials and cadres, and the use of iBangga data in evidence-based family development planning at the village and sub-district levels are needed.

Keywords

Family Development, Socialization, Program Evaluation



© 2025 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan keluarga merupakan aspek fundamental dalam pembangunan manusia berkelanjutan, karena keluarga adalah unit sosial terkecil yang berfungsi sebagai agen sosialisasi utama, pengasuhan, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial (Qomariah, 2021). Untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkenalkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai indikator komposit yang memadukan dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketahanan keluarga, dan perlindungan sosial (BKKBN, 2021). Indikator semacam ini berangkat dari pemikiran bahwa pendekatan multidimensional memberi gambaran lebih holistik dibandingkan indikator tunggal (misalnya hanya ekonomi atau kesehatan).

Pada tataran daerah, implementasi iBangga sering terbatas pada aspek teknis pengukuran dan pelaporan, sementara pemahaman mendalam tentang maknanya dalam kebijakan lokal masih lemah. Hal ini mencerminkan gap: meskipun konsep dan instrumen sudah ada, kajian empiris di tingkat kabupaten/kota mengenai bagaimana aparat daerah dan kader memahami, menginternalisasi, serta menerapkannya sangat terbatas. Padahal, literatur pembangunan keluarga menunjukkan bahwa efektivitas suatu indeks atau indikator tergantung pada kualitas ownership lokal, kapasitas institusi, dan partisipasi publik (Oktriyanto et al., 2023). Jika tidak didukung secara lokal, indikator bisa menjadi dokumen simbolik semata. Di ranah sosial dan kebijakan publik, teori policy implementation gap menyebutkan bahwa perbedaan antara desain kebijakan dan aplikasi di lapangan sering muncul karena kekurangan kapasitas, konflik antarotoritas, atau miskomunikasi antaraktor (Ansori, 2025).

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan kependudukan dan sosial ekonomi yang kompleks, termasuk urbanisasi cepat dan ketimpangan wilayah. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Kaltim (2022), capaian iBangga di Samarinda masih sangat bervariasi antar kecamatan, terutama pada sub-indikator kesehatan reproduksi, akses KB, dan stunting. Kondisi ini menandakan bahwa pemahaman dan adopsi iBangga sebagai instrumen kebijakan keluarga masih belum merata di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Rumusan masalah dalam kegiatan sosialisasi ini adalah: “Bagaimana meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparaturnya kecamatan, kelurahan, dan kader di Kota Samarinda agar mampu menerapkan iBangga dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan keluarga?” Kegiatan sosialisasi ini bertujuan tidak sekadar

mentransfer pengetahuan, tetapi mendorong internalisasi iBangga sebagai instrumen kebijakan lokal yang relevan.

Urgensi program ini sangat tinggi, mengingat capaian iBangga berkaitan langsung dengan isu strategis seperti penurunan stunting, pencegahan pernikahan usia anak, dan target pembangunan manusia dalam visi Indonesia 2045. Selain itu, agar indikator iBangga tidak berhenti sebagai alat ukur, tetapi digunakan secara actionable, perlu diperkuat melalui regulasi lokal, dukungan kelembagaan, dan sinergi lintas sektor agar data yang dihasilkan benar-benar dapat mempengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya daerah.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat (*community service*) dengan pendekatan kualitatif berbasis diskriptif dilakukan secara partisipatif melalui kombinasi observasi dan pelatihan (Basri et al., 2023; Putra et al., 2024). Observasi dilakukan pada tahap awal sebagai bentuk pengumpulan data lapangan untuk mengidentifikasi kondisi keluarga di Kota Samarinda, menganalisis kebutuhan intervensi, serta merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Hasil observasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan dan penentuan sasaran program, yaitu para lurah, camat, kader Pembantu Keluarga Berencana (PKB), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berperan langsung dalam pendampingan masyarakat di tingkat kelurahan.

Tahap selanjutnya adalah pelatihan dan sosialisasi, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas peserta. Pada tahap ini, peserta memperoleh materi terkait konsep iBangga, indikator pembentuknya, serta pentingnya pembangunan keluarga dalam mendukung program prioritas nasional seperti penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM. Sosialisasi dilakukan dengan metode presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pengisian instrumen iBangga agar peserta memiliki pemahaman yang komprehensif.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan terstruktur, yaitu:

1. Tahap sosialisasi, yang ditujukan untuk memberikan pemahaman awal kepada lurah, camat, PKB, dan PLKB mengenai urgensi iBangga sebagai indikator pembangunan keluarga di Kota Samarinda.
2. Tahap penyusunan indeks, di mana peserta dilatih untuk melakukan pengumpulan, validasi, serta pengolahan data iBangga sesuai indikator yang ditetapkan oleh BKKBN.

3. Tahap perumusan rekomendasi kebijakan, yaitu merumuskan strategi intervensi berdasarkan hasil analisis indeks, termasuk identifikasi wilayah dengan capaian rendah.
4. Tahap penyusunan regulasi (Peraturan Wali Kota), sebagai bentuk legalisasi kebijakan agar implementasi iBangga memiliki landasan hukum yang kuat serta berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Subjek kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 50 orang peserta yang terdiri dari para lurah, camat, kader PKB, dan PLKB yang tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda. Kegiatan dilaksanakan secara terjadwal, dengan pembagian sesi berdasarkan tahapan program. Dengan penerapan metode observasi dan pelatihan, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan. Observasi memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sosial dan tantangan pembangunan keluarga di tingkat kelurahan, sementara pelatihan menghadirkan solusi praktis berupa peningkatan kapasitas aparatur dan kader dalam mengelola data serta menyusun kebijakan berbasis iBangga. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam kegiatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan keluarga yang lebih efektif, partisipatif, dan aplikatif di Kota Samarinda.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Kegiatan yang berjudul “Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Samarinda” dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Samarinda.

Konsep Pembangunan kapasistas ini sesuai dengan konsep pembangunan keluarga secara teoritis berakar pada paradigma pembangunan manusia yang menempatkan keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial yang berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut teori pembangunan keluarga, kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang saling berinteraksi secara dinamis (Kabeer, 1999). Dalam konteks implementasi iBangga, pembangunan keluarga dipahami sebagai proses pemberdayaan yang menuntut sinergi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan peran kader sebagai agen perubahan di tingkat lokal. Dengan

demikian, pendekatan pembangunan keluarga menekankan pentingnya keberlanjutan, inklusivitas, serta keadilan sosial dalam upaya menciptakan keluarga yang tangguh dan berdaya.

Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan Bappeda, Lurah, Camat, Kader Posyandu, Pembantu Keluarga Berencana (PKB), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep iBangga, indikator pembentuknya, serta urgensi pembangunan keluarga dalam mendukung program prioritas nasional dan daerah.

Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta mampu memahami peran strategis iBangga sebagai instrumen kebijakan, serta dapat mengimplementasikannya dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

3.1. Hasil Pelaksanaan Program

Pelaksanaan sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Samarinda berjalan dengan baik dan mendapatkan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai dasar hukum pembangunan keluarga, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, hingga Peraturan BKKBN yang menegaskan pentingnya pengukuran keberhasilan pembangunan keluarga melalui iBangga. Hal ini menjadi pijakan awal bagi peserta untuk memahami bahwa pembangunan keluarga memiliki kerangka hukum yang kuat dan wajib diimplementasikan.

Dalam kegiatan ini, disampaikan pula fungsi strategis iBangga, diantaranya sebagai ukuran kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan keluarga, kedua menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor dan terakhir menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah, sehingga dapat menjadi acuan evaluasi.

Peserta sosialisasi memahami bahwa iBangga bukan hanya sekadar instrumen pengukuran, tetapi juga alat strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan keluarga. Diskusi interaktif yang berlangsung menegaskan bahwa pemanfaatan data iBangga akan membantu Kota Samarinda dalam menyiapkan kebijakan pembangunan keluarga yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menekankan arah pembangunan keluarga berkualitas di Kota Samarinda, sebagaimana disampaikan oleh PLT Sekretaris Daerah Kota Samarinda. Beliau menekankan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan manusia.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas keluarga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Samarinda.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi iBangga ini menghasilkan pemahaman bersama bahwa :

1. Data iBangga perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan.
2. Peningkatan kualitas keluarga menjadi prioritas utama dalam mendukung pembangunan manusia di Kota Samarinda.
3. Diperlukan sinergi antar perangkat daerah, lembaga, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi iBangga.

Dengan hasil ini, diharapkan iBangga dapat menjadi instrumen penggerak kebijakan sekaligus mendorong terwujudnya keluarga berkualitas di Kota Samarinda.



Gambar 1 Penyampaian Pengantar oleh Plt. Sekda Kota Samarinda

Fungsi dari kegiatan sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pembangunan keluarga dilaksanakan, diukur, serta diarahkan menuju tujuan akhirnya, yaitu terwujudnya keluarga berkualitas.

1. Input

Input pembangunan keluarga mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi awal keluarga. Faktor tersebut terdiri dari:

1. Fisik, yaitu lingkungan dan sarana-prasarana yang mendukung kehidupan keluarga, seperti hunian layak, kesehatan, dan akses pendidikan.
2. Non fisik, meliputi regulasi, kebijakan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memastikan terlaksananya pembangunan keluarga.
3. Struktur, fungsi, dan peran keluarga, yang menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan keluarga.

4. Tahapan perkembangan keluarga, yang menggambarkan dinamika kebutuhan keluarga berdasarkan siklus hidup, mulai dari pembentukan, pengasuhan, hingga masa lansia.

Keseluruhan input ini akan membentuk lingkungan dan kondisi keluarga yang menjadi titik awal dalam pembangunan keluarga (BKKBN, 2021).

2. Proses

Tahap proses merupakan intervensi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Intervensi ini mencakup berbagai program, layanan, dan kebijakan, seperti penyuluhan keluarga, program kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pembinaan ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas. Proses ini penting untuk memastikan keluarga memiliki daya tahan dan kemampuan menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya (BKKBN, 2021).

3. Output

Hasil langsung dari intervensi ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah munculnya karakteristik keluarga yang lebih baik, yang meliputi:

1. Keluarga mandiri, yaitu keluarga yang memiliki kemandirian ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan berdaya dalam menghadapi tantangan.
2. Keluarga tentram, yang menunjukkan adanya keharmonisan, komunikasi, serta hubungan yang sehat antar anggota keluarga,
3. Keluarga bahagia, yang merefleksikan terpenuhinya aspek psikologis, sosial, dan emosional dalam kehidupan keluarga.

Output ini menjadi indikator keberhasilan jangka menengah dari pembangunan keluarga (BKKBN, 2021).

4. Outcome

Outcome atau hasil akhir dari kerangka konseptual pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas diartikan sebagai keluarga yang mandiri, tentram, dan bahagia sehingga mampu menjadi basis utama dalam pembangunan manusia seutuhnya. Outcome ini tidak hanya berpengaruh pada keluarga itu sendiri, tetapi juga pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah, termasuk Kota Samarinda, karena keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi pondasi pembangunan bangsa (BKKBN, 2021; Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022).



Gambar 2 Penyampaian Materi tentang Sosialisasi iBangga

Kegiatan sosialisasi iBangga di Kota Samarinda menunjukkan antusiasme tinggi dari para peserta. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, yang mencerminkan kepedulian peserta terhadap keberlanjutan program pembangunan keluarga di daerah.

Pertama, muncul pertanyaan mengenai penganggaran oleh Bapperida. Peserta menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam implementasi iBangga agar pengukuran maupun tindak lanjut program dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa tanpa alokasi sumber daya yang memadai, pelaksanaan program berpotensi terhambat.

Kedua, peserta juga menanyakan mengenai pembedahan segera untuk pengukuran iBangga. Hal ini mengindikasikan keinginan kuat dari stakeholder untuk segera memperoleh data faktual terkait kondisi keluarga di Kota Samarinda. Data tersebut dipandang krusial untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat pertanyaan terkait langkah konkret yang dilakukan oleh camat dan lurah di lapangan. Peserta mengharapkan adanya peran aktif dari pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Pertanyaan ini mencerminkan kebutuhan akan sinergi lintas sektor dan penguatan peran pemerintah di tingkat lokal.



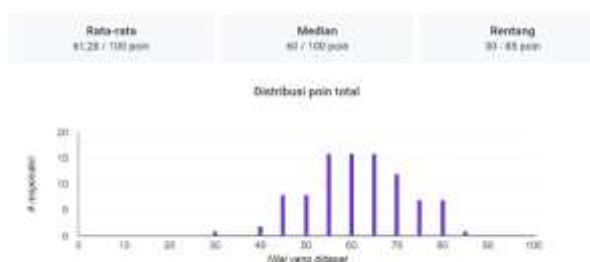
Gambar 3 Para Peserta Sosialisasi iBangga

Perhatian juga tertuju pada peran kader di lapangan. Para peserta menegaskan bahwa kader memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendampingi keluarga, mensosialisasikan program, serta melakukan pengumpulan data yang menjadi dasar penghitungan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Dukungan dan pemberdayaan kader dengan peningkatan kapasitas, pelatihan teknis, serta insentif yang memadai menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi iBangga dan peningkatan kualitas pembangunan keluarga.

Secara keseluruhan, antusiasme peserta tercermin dari orientasi mereka yang tidak hanya berupaya memahami konsep iBangga, tetapi juga menyoroti pentingnya kejelasan strategi implementasi, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta pembagian peran yang proporsional antara pemerintah daerah, aparat wilayah, dan kader lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu pembangunan keluarga telah menjadi perhatian lintas sektor di Kota Samarinda.

Lebih jauh, temuan ini mengandung implikasi sosial dan kebijakan yang signifikan. Dari sisi sosial, penguatan peran kader dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga serta memperkuat jejaring sosial berbasis komunitas. Sementara itu, dari perspektif kebijakan, hasil ini menegaskan perlunya kerangka regulasi yang lebih jelas misalnya melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memastikan keberlanjutan program dan integrasi data iBangga dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga membuka ruang bagi dialog kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat arah pembangunan keluarga yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

4. KESIMPULAN



Gambar 4 Pre Test



Gambar 5 Post Test

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test kegiatan sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Samarinda, diperoleh sejumlah temuan penting sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan Peserta

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti sosialisasi. Nilai rata-rata meningkat dari 61,28 pada pre-test menjadi 64,47 pada post-test, sedangkan median nilai naik dari 60 menjadi 65. Selain itu, rentang nilai juga menunjukkan perbaikan, dari 30–85 poin menjadi 40–85 poin. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil menambah wawasan peserta terkait konsep, fungsi, dan mekanisme pengukuran iBangga.

Meskipun peningkatannya relatif moderat, hasil ini menunjukkan efektivitas awal dari pendekatan edukatif yang diterapkan. Ke depan, metode penyampaian dapat dikembangkan lebih interaktif, misalnya dengan studi kasus lokal atau simulasi pengisian instrumen iBangga agar pemahaman peserta semakin mendalam.

2. Distribusi Nilai dan Pemerataan Pemahaman

Analisis distribusi nilai memperlihatkan pergeseran positif. Pada pre-test, sebagian besar nilai berada di kisaran 55–65 poin, sedangkan pada post-test, distribusi bergeser ke kisaran 60–75 poin. Pergeseran ini menunjukkan adanya pemerataan peningkatan pemahaman di antara peserta. Namun, masih terdapat sebagian kecil peserta dengan peningkatan minimal, yang dapat menjadi perhatian untuk pelatihan lanjutan atau pendampingan teknis lebih intensif di tingkat kecamatan dan kelurahan.

3. Antusiasme dan Persepsi Peserta

Tingginya antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama mengenai aspek penganggaran, teknis pengukuran, serta langkah implementatif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini menandakan bahwa peserta tidak hanya memahami secara konseptual, tetapi juga mulai menaruh perhatian terhadap aspek operasional iBangga di lapangan.

Peserta juga menyoroti perlunya Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda sebagai dasar hukum untuk memperkuat pelaksanaan iBangga di daerah. Usulan ini sangat relevan mengingat keberlanjutan program memerlukan dukungan regulatif agar memiliki kejelasan struktur pelaksana, mekanisme koordinasi lintas sektor, dan dukungan anggaran yang memadai.

4. Implikasi Sosial dan Kebijakan

Secara sosial, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pembangunan keluarga mulai bergeser dari sekadar tanggung jawab individu atau rumah tangga menjadi isu kolektif yang memerlukan intervensi kebijakan terintegrasi. Implementasi iBangga dapat menjadi instrumen strategis bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam mengidentifikasi ketimpangan kesejahteraan keluarga, memetakan kelompok rentan, serta menyusun program intervensi berbasis data.

Dari sisi kebijakan, peningkatan pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap iBangga menjadi langkah awal penting dalam membangun ekosistem kebijakan pembangunan keluarga yang berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi lokal dan komitmen lintas perangkat daerah, Samarinda berpotensi menjadi salah satu daerah percontohan penerapan iBangga berbasis partisipasi masyarakat di Kalimantan Timur.

Saran

Hasil kegiatan sosialisasi iBangga di Kota Samarinda menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan antusiasme masyarakat serta aparaturnya terhadap pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia. Namun, efektivitas implementasi program ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat di tingkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan Keluarga dan Implementasi iBangga menjadi langkah strategis untuk memberikan legitimasi, arah kebijakan, serta kejelasan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Regulasi ini tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga instrumen koordinasi antarperangkat daerah agar upaya pembangunan keluarga dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Selain aspek regulasi, dukungan anggaran dan kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi iBangga. Pemerintah Kota Samarinda melalui Bapperida dan perangkat daerah terkait perlu mengoptimalkan alokasi sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk mendukung kegiatan pengukuran, sosialisasi, dan evaluasi. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas aparat kecamatan, kelurahan, dan kader lapangan sangat penting agar mereka mampu menjalankan fungsi edukatif dan fasilitatif secara efektif. Pemberdayaan aparaturnya dan kader di tingkat akar rumput menjadi kunci agar data dan hasil pengukuran iBangga benar-benar mencerminkan kondisi riil keluarga di masyarakat.

Pemanfaatan data iBangga hendaknya tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan dimanfaatkan sebagai basis evidensi dalam perumusan kebijakan

pembangunan keluarga yang lebih tepat sasaran. Keberlanjutan sosialisasi juga perlu dijaga melalui kegiatan rutin dan kolaboratif lintas sektor agar pemahaman masyarakat semakin meningkat serta terbentuk komitmen kolektif dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Samarinda. Dengan demikian, iBangga dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen reflektif kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Annisa, A., Yulindrasari, H., & Fadila, N. (2021). *Family development session of the Indonesian family welfare program*. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Development and Quality Assurance (ICED-QA 2020)* (pp. 67–73). Atlantis Press.
- Ansori, T., & Muchlashin, A. (2025). Penurunan Stunting Berbasis Komunitas Studi Kasus Percontohan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman: Community-Based Stunting Reduction: A Pilot Case Study of Sidoluhur Village, Sleman Regency. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 339–351.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Indeks pembangunan keluarga (iBangga)*. BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id/>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Petunjuk teknis Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Laporan capaian pembangunan keluarga Kalimantan Timur 2021–2022*. Samarinda: BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Laporan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Samarinda tahun 2022*. Samarinda: BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2022). *Profil pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur 2022*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Basri, B., Rahayu, A., & Fajri, F. (2023). KKN multimatik pemberdayaan masyarakat melalui official media di Desa Tammangalle. *Jurnal Sipissanngi*, Universitas Al Asyariah Mandar.
- Kabeer, N. (1999). *Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment*. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kusuma, F. D. P. (2022). *The role of the government in supporting increasing quality of families in Indonesia*. *BUANA ILMU Journal of Humanities and Social Sciences (BIAR Journal)*, 7(2), 145–156.
- Oktriyanto, S., Khotimah, N., & Dewi, R. (2023). *Family development program:*

- Optimizing family functions in strengthening family resilience. Journal of Social Service Research*, 49(5), 872–888. <https://doi.org/10.1080/01488376.2023.2217221>
- Pemerintah Kota Samarinda. (2023). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Samarinda tahun 2023*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2023). *Laporan kinerja pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2023*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2023). *Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kota Samarinda 2021–2026*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga.
- Qomariah, S., & Ansori, T. (2021). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dalam Membentuk Keluarga Sakinah para Tunagrahita. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 3(2), 1-14.
- Yani, M., Puspitawati, H., Ilzana, T. M., & Rahmawati, D. (2022). *Factors affecting the family development index in Indonesia. F1000Research*, 11, 1216.